

---

***THE INFLUENCE OF VILLAGE APPARATUS COMPETENCY, UTILIZATION OF INFORMATION TECHNOLOGY AND INTERNAL CONTROL SYSTEM ON VILLAGE FUND MANAGEMENT ACCOUNTABILITY***

**PENGARUH KOMPETENSI APARAT DESA, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA**

**Oleh:**

**Nela Safelia**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, Jambi - Indonesia

Email: [nelasafelia@unja.ac.id](mailto:nelasafelia@unja.ac.id)

---

**RIWAYAT ARTIKEL:**

Artikel Masuk: 27 Juli 2023

Artikel Diterima: 31 Juli 2023

---

**ABSTRACT**

*This study aims to see the influence of village apparatus competence, the use of information technology and internal control systems that can affect the accountability of managing village funds in Maro Sebo Ilir District, Batang Hari Regency. This research is a descriptive quantitative research, the type of data used in this research is primary data, from the results of distributing questionnaires and secondary data obtained from library research and documents related to village fund management. The population and sample used in this study were all village fund managers, while the data analysis technique in this study used multiple linear regression analysis. The results of the study show that the competency of the village apparatus, the internal control system has an effect on the accountability of village fund management, while the use of information technology has no effect on the accountability of village fund management.*

*Keywords: Competence of Village Officials, Utilization of Information Technology, Internal Control System, Village FundManagement*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh kompetensi aparat desa, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa yang berada di Kecamatan Maro Sebo Ilir Kabupaten Batang Hari. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, dari hasil penyebaran kuesioner dan data sekunder yang diperoleh dari riset pustaka dan dokumen terkait pengelolaan dana desa. Populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh pengelola dana desa, adapun teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi aparat desa, sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

**Kata Kunci:** Kompetensi aparat desa, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian Internal, akuntabilitas pengelolaan dana desa.

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Akuntabilitas telah menjadi elemen penting dalam lingkungan pemerintahan, khususnya di negara-negara demokrasi (Guerin et al., 2018). Menurut data World Governance Indicators (WGI), Akuntabilitas merupakan salah satu dimensi yang paling penting untuk dinilai. Sistem desentralisasi yang diterapkan pada suatu pemerintahan bertujuan untuk mendistribusikan tanggung jawab, wewenang dan sumber daya keuangan untuk memberikan pelayanan publik di berbagai pemerintahan (Tim Tematik Desentralisasi, 2020). Fleksibilitas dalam mengatur daerah sendiri akan membuat pemerintah daerah lebih spesifik dalam memetakan prioritas kebutuhan daerah. Pelaksanaan desentralisasi di tingkat desa menitik beratkan pada tujuan tercapainya desa mandiri yang sejahtera. Desa sejahtera mandiri memiliki ciri-ciri memiliki daya saing dalam menghasilkan produk, aktif dalam kegiatan kelembagaan sosial, memiliki partisipasi masyarakat yang tinggi dan keterlibatan masyarakat miskin dalam rantai produksi (Wibowo, 2019). China merupakan salah satu negara yang berhasil menerapkan desentralisasi dan menjadikan desa mandiri dalam perekonomian. Salah satu contohnya adalah Desa Huaxi yang mampu memaksimalkan potensi desa dalam industri multi sektor dari tekstil hingga baja (Muliana, 2017).

Desentralisasi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa diberikan kesempatan dan kewenangan oleh pemerintah pusat untuk menyelenggarakan pemerintahannya secara mandiri, termasuk pengelolaan keuangan dana desa. (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2017).

Akuntabilitas tidak hanya sekedar mempertanggungjawabkan keuangan secara formal kepada masyarakat, tetapi juga meliputi pertanggungjawaban terhadap kepatuhan pada peraturan, lingkungan organisasi, masyarakat dan pemerintah (Mahayani, 2017 dalam Ardianti & Suartana, 2020). Akuntabilitas menunjukkan sejauh mana keberhasilan dari tercapainya visi dari Undang-Undang desa guna mewujudkan desa yang maju, kuat, mandiri, demokratis dan berkeadilan dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Hal ini merupakan tuntutan mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa yang menjadi fokus penting bagi perangkat desa (Ardianti & Suartana, 2020).

Azaz akuntabilitas ini harus mampu diterapkan oleh pemerintah desa dalam tata kelola pemerintahannya, dimana semua kegiatannya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Pengelolaan keuangan desa telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 yang diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan desa.

Pada umumnya anggaran yang dialokasikan tidak terealisasi, dan diduga menyimpang dari visi dan misi yang telah ditetapkan sehingga dapat mempengaruhi kinerja perangkat desa (Putri & Wirawati, 2020). Mengantisipasi permasalahan penyimpangan kepengurusan yang dapat terjadi pada pemerintah desa, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa sangat dibutuhkan oleh pemerintah desa sebagai kepengurusan untuk menjaga kepercayaan dan kepuasan masyarakat sebagai pemilik dana yang dikelola oleh pemerintah desa. Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa merupakan tuntutan publik yang menuntut lembaga penyelenggara pelayanan publik untuk menekankan tidak hanya tanggung jawab vertikal tetapi juga tanggung jawab horizontal. Selain itu, lembaga publik juga wajib membuat laporan pertanggungjawaban sebagai parameter kinerja organisasi sektor publik (Mardiasmo, 2013).

Dana Desa yang berasal dari APBN diberikan kepada desa didasari pada penggunaan yang diprioritaskan untuk membiayai bidang pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 16 Tahun 2018.

**Tabel 1. Anggaran Dana Desa Kabupaten Batang Hari**

No	Tahun	Anggaran Dana Desa
1	2018	Rp88.949.104.000
2	2019	Rp98.515.111.000
3	2020	Rp99.853.707.000

Sumber: Kementerian Keuangan RI

Permasalahan yang terjadi di Kabupaten Batang Hari ini diantaranya masih kurangnya pengetahuan aparat desa terkait regulasi dan aturan yang berkaitan dana desa. Selain itu, pada tahun 2019 dari 110 desa di Kabupaten Batang Hari hanya 97 desa yang telah mendapatkan dana desa, 13 desa lainnya belum bisa mendapatkan pencairan dana desa disebabkan belum diselesaikannya rekapitulasi APBDes. Dari 13 desa yang belum menyelesaikan laporan rekapitulasi APBDes termasuk kedalamnya desa yang berada di Kecamatan Maro Sebo Iilir. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman bagi aparat desa untuk segera menyelesaikan laporan rekapitulasi APBDes (Faisal, 2019).

Kecamatan Maro Sebo Iilir adalah salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Batang Hari, Kecamatan Maro Sebo Iilir terdiri dari 7 (tujuh) desa. Setiap desa di Kecamatan Maro Sebo Iilir ini setiap tahunnya mendapatkan Dana Desa yang dianggarkan oleh pemerintah dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan. Namun, menurut Bakeuda Kabupaten Batang Hari, M Azan mengatakan bahwa pada pencairan anggaran dana desa pada tahun 2019 terdapat belasan desa yang belum menyelesaikan administrasi berupa rekapitulasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) sehingga dana desa tahap pertama tidak bisa

dicairkan, karena penyelesaian rekapitulasi APBDes merupakan salah satu syarat administrasi dari pencairan Dana Desa. Salah satu desa tersebut berada di Kecamatan Maro Sebo Ilir yaitu Desa Bukit Sari dan Desa Kehidupan Baru, kejadian ini tidak hanya terjadi di tahun 2019 tetapi juga terjadi di tahun 2018 dimana desa tersebut selalu lamban dalam menyelesaikan laporan APBDes (Chy, 2019) Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh mendapatkan bahwa keterlambatan laporan rekapitulasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) yang terjadi pada desa Bukit Sari dan Kehidupan Baru ini terjadi karena beberapa faktor yaitu rendahnya pengetahuan serta kepedulian aparat desa, rendahnya pengelolaan teknologi informasi pada lingkungan desa tersebut, sehingga memperlambat pelaporannya.

Akuntabilitas pengelolaan dana desa tidak lepas dari kompetensi perangkat desa dan komitmen organisasi. Kompetensi perangkat desa sangat menentukan dalam memahami pengelolaan dana desa (Medianti, 2018). Pemahaman mereka tentang pengelolaan dana desa akan berdampak pada kredibilitas laporan keuangan yang mereka buat yang tentunya harus sesuai dengan standar pemerintah pusat. Komitmen organisasi menjadi faktor penting dalam meningkatkan kinerja pemerintah desa dan menekan kesalahan dalam pelaporan (Sofyani, Santo, Najda, & Almaghribi, 2020).

Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan dana desa akan memudahkan perangkat desa dalam mengolah data mulai dari tahap perencanaan hingga pelaporan. Dengan bantuan teknologi informasi, informasi yang ada akan lebih mudah diperoleh dan diolah sehingga dapat lebih membantu tugas perangkat desa. Berdasarkan Andayani et Al. (2018), teknologi informasi adalah sarana dan sistem untuk memperoleh, mentransmisikan, memproses, menafsirkan, menyimpan, mengatur, dan menggunakan data secara bermakna. Apalagi alokasi dana desa dengan nilai yang tidak sedikit tentunya pemerintah desa harus mampu mengelolanya dengan baik dan efisien untuk melaksanakan pembangunan desa demi kesejahteraan masyarakat desa (Setiawan & Melinda, 2020). Pemerintah desa menjalankan tugasnya dalam melakukan akuntabilitas keuangan dengan menyajikan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan sesuai dengan karakteristik laporan keuangan (relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat diperbandingkan) (Panggabean, 2021).

Sistem Pengendalian Intern dapat mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang baik. Dengan adanya sistem pengendalian intern diharapkan dapat menghasilkan pengelolaan alokasi dana yang dapat dipertanggungjawabkan. Hasil penelitian Martin et al., (2019) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa, pengendalian intern adalah cara untuk mengarahkan, memantau dan mengukur sumber daya suatu organisasi, selain itu pengendalian internal juga memiliki peran penting untuk mencegah atau mendeteksi kecurangan.

Salah satu tujuan umum dari sistem pengendalian intern adalah untuk menjaga kehandalan laporan keuangan (A et al., 2016). Hasil penelitian masih banyak menunjukkan bahwa masih banyak organisasi atau lembaga pemerintah yang belum mampu mewujudkan tuntutan atas akuntabilitas pengelolaan dana desa (Dewi & Gayatri, 2016).

### 1.2 Rumusan Masalah

- a) Apakah Kompetensi Aparat Desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
- b) Apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
- b) Apakah sistem pengendalian Internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Desa merupakan salah satu bagian terpenting dalam pelaksanaan desentralisasi dan demokratisasi di daerah. Pemerintahan desa Desa diberikan kesempatan dan kewenangan oleh pemerintah pusat untuk menyelenggarakan pemerintahannya secara mandiri, termasuk pengelolaan keuangan dana desa, peneliti ini akan melihat apakah kompetensi aparat desa, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa yang berada di Kecamatan Maro Sebo Ilir Kabupaten Batang Hari.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

### 2.1 Teori Agency

Hubungan keagenan terjadi ketika kontrak seseorang sebagai prinsipal dan seseorang sebagai agen melakukan jasa untuk kepentingan prinsipal dalam mengelola kekayaannya (Adi et al., 2020). Tantangan yang muncul adalah bagaimana cara untuk dapat memotivasi agen agar mereka menjadi sama produktifnya dengan prinsipal (Anthony et al., 2012). Teori agensi menjelaskan hubungan antara prinsipal bisnis dan pemangku kepentingan mereka (agen) yang merupakan pemegang sumber daya. Dengan kata lain agen adalah pembuat keputusan yang mengambil keputusan sehari-hari tetapi tidak menanggung resiko dalam bentuk apapun (Hill, C. W., & Jones 1992 dalam Kuma & Effandi Yosuff, 2020).

### 2.2 Teori Stewardship

*Stewardship* adalah sikap dan perilaku yang menempatkan kepentingan jangka panjang kelompok diatas tujuan pribadi (Hernandez 2008 dalam Jefri, 2018). Teori stewardship menggambarkan dimana tidak ada kondisi atau situasi manajemen yang termotivasi untuk tujuan-tujuan pribadi melainkan hanya fokus untuk tujuan kepentingan organisasi (Luthfiani et al., 2020).

Teori *stewardship* mirip dengan teori agensi yang juga menganalisis bagaimana memastikan setiap tugas

lebih akuntabel. Teori *stewardship* lebih berfokus kepada tujuan kolektif daripada tujuan individu. Disisi lain, hal ini didasarkan pada analisis logis dan sosiologis dari perilaku manusia dan mengasumsikan bahwa motivasi dari dalam sangat membantu dalam menjelaskan perilaku (Schillemans & Bjurström, 2020).

### 2.3 Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban yang dimiliki agen untuk dapat mengungkapkan, melaporkan dan mempertanggung jawabkan segala tugas dan kegiatan yang dilakukan pihak prinsipal yang memiliki hak untuk dapat meminta pertanggungjawaban tersebut (Guerin et al., 2018). Secara teoritis, konsep akuntabilitas didasarkan pada teori prinsipal dan agen yang berpusat pada hubungan antara pemerintah dan konstituennya. Pemerintah adalah manajer politik yang ditugaskan oleh prinsipalnya (masyarakat). Karena kewajiban yang diberikan, pemerintah berkewajiban untuk bertanggung jawab kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepadanya. (Samaratunge et al., 2008). Setidaknya ada tiga aspek akuntabilitas dalam sektor publik: (a) akuntabilitas horizontal dari kewenangan pemerintah daerah kepada perwakilan terpilih ; (b) akuntabilitas ke bawah dari perwakilan terpilih kepada otoritas pemerintah daerah kepada masyarakat; dan (c) akuntabilitas ke atas dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat (Kituyi & Moi, 2021).

Tuntutan mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa menjadi fokus penting bagi perangkat desa, hal ini dikarenakan akuntabilitas mampu menunjukkan keberhasilan dari tercapainya tujuan desa. Perangkat desa menyajikan bentuk pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan yang dihasilkan melalui proses akuntansi yang transparan dan akuntabel (Ardianti & Suartana, 2020).

### 2.4 Kompetensi Aparat Desa

Kompetensi adalah suatu keterampilan dan pengetahuan yang dicirikan oleh profesionalisme dalam suatu bidang tertentu (Wibowo, 2019). Pengetahuan (*Knowledge*), keterampilan (*Skill*) dan sikap (*Attitude*) merupakan komponen dari pembentukan kompetensi. Pengetahuan (*Knowledge*). Menurut Katamang (2018) dalam (Sari & Aji, 2020) adalah informasi yang dimiliki seseorang dalam suatu bidang tertentu. Keterampilan (*Skill*) merupakan sebuah kemampuan dasar yang dimiliki oleh anggota dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Sebagai contoh keterampilan adalah kemampuan untuk bekerja sama dan memotivasi orang lain, serta keterampilan dalam berkomunikasi (Sari & Aji, 2020). Sikap (*Attitude*) sikap merupakan suatu keramahan dan kesopanan yang dimiliki oleh anggota dalam memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat, serta memiliki inisiatif dalam melakukan pekerjaannya (Mada et al., 2017).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari & Aji (2020) menyatakan bahwa kompetensi perangkat desa berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa di

Kabupaten Banyumas. Hal ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Luthfiani et al., (2020) yang menyatakan bahwa kompetensi perangkat desa tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Hal ini didukung oleh hasil penelitian yang menjelaskan bahwa kompetensi aparat desa yang berkualitas akan mempengaruhi tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa (Umar, Usman, & Purba, 2018).

### 2.5 Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan dana desa akan memudahkan perangkat desa dalam mengolah data mulai dari tahap perencanaan hingga pelaporan. Dengan bantuan teknologi informasi, informasi yang ada akan lebih mudah diperoleh dan diolah sehingga dapat lebih membantu tugas perangkat desa. Berdasarkan Andayani et Al. (2018), teknologi informasi adalah sarana dan infrastruktur (perangkat keras, perangkat lunak, perangkat pakai) sistem dan metode untuk memperoleh, mentransmisikan, memproses, menafsirkan, menyimpan, mengatur, dan menggunakan data secara bermakna. Menurut Zanaria (2017),

Dalam rangka membantu pemerintah desa meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) membuat aplikasi yang disebut Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) (Artini et al, 2017). Berdasarkan Laka dan Suprasto (2020), Aplikasi Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan aplikasi yang dikembangkan untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Studi sebelumnya menegaskan peran teknologi informasi membantu organisasi untuk meningkatkan akuntabilitas. Penelitian yang mendukung teknologi informasi dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa (Nurhidayati, 2019; Enggar et al., 2020). Dengan demikian, penggunaan teknologi informasi mendorong tanggung jawab aparat desa dalam pengelolaan dana agar lebih baik. Studi lain menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana (Savitri et al., 2020).

### 2.6 Sistem Pengendalian Intern

PP No 60 (2008) Menjelaskan SPI yaitu mekanisme yang lengkap pada perilaku serta tindakan yang dilaksanakan secara kontinu oleh seluruh bagian lembaga guna menyampaikan keyakinan yang sesuai dengan visi lembaga dengan tindakan efektif serta efisien, laporan keuangan yang meyakinkan, perlindungan harta negara, serta kesesuaian dengan perundang-undangan. Septarini, 2016 Mengatakan SPI adalah alat sebagai lisensi ketaatan terhadap aturan dan undang-undang yang ada, sebagai jaminan kualitas laporan keuangan beserta data keuangan, dan sebagai fasilitator keefisienan serta keefektifitasan operasi dari pemerintah.

Menurut Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission (COSO) dalam Mokoginta, 2017 komponen pengendalian internal terdiri dari: Lingkungan pengendalian, Penaksiran risiko, Informasi dan komunikasi, Aktivitas pengendalian, Pemantauan. Tujuan pengendalian internal menurut Mulyadi 2017 adalah: Melindungi harta lembaga, Memeriksa kehati-

hatian serta keandalan informasi akuntansi, Meningkatkan efisiensi, Meningkatkan kepatuhan terhadap aturan manajemen. Fitriawati, dkk. (2017) berpendapat bahwa sistem pengendalian internal yang baik dalam suatu organisasi akan mampu menciptakan yang unggul keseluruhan proses kegiatan.

## 2.7 Penelitian Terdahulu

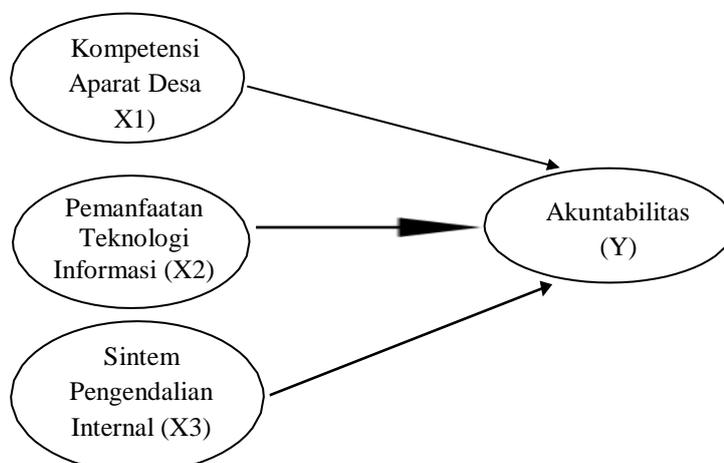
**Tabel 2. Penelitian Terdahulu**

Peneliti dan Judul	Setting	Hasil
Fathurrahman, A., Suprihati, S., & Samanto, H. (2022) The Influence Of The Quality Of Human Resources, Community Participation, And Utilization Of Information Technology On Village Fund Management Accountabilityin Klaten Regency	Seluruh perangkat desa di Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten.	Kualitas SDM, Partisipasi Masyarakat, dan Pemanfaatan IT berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten
Savitri, E., Andreas, A., Diyanto, V., & Gumanti, T. A. (2020). Accountability Of Village Fund Management In Riau Province	Penelitian pada 104 desa di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau.	kompetensi perangkat desa, sistem pengendalian intern, partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
Widiawati, D., Yuliani, N. L., & Purwantini, A. H. (2022). Analysis of Determinants on Village Fund Management Accountability	Penelitian pada desa-desa di Kecamatan Candimulyo. berjumlah 108 responden,	Sistem pengendalian intern, penggunaan teknologi informasi, partisipasi masyarakat, sistem keuangan desa dan transparansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
Taufik, O., & Ikram, S. (2022) Factors Affecting Village Financial Management Accountability	Populasi dalam penelitian ini adalah desa-desa di Kabupaten Tasikmalaya.	kompetensi sumber daya manusia, komitmen organisasi, dan penggunaan teknologi informasi mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa

Sumber: Data diolah Peneliti

## 2.8 Kerangka dan Model Penelitian

Model penelitian dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Data diolah Peneliti

**Gambar 1. Model Penelitian**

Dari gambar 1 dapat dijelaskan bahwa penelitian ini digunakan untuk menguji pengaruh Kompetensi Aparat Desa, (X1), Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2), dan Pengendalian Internal (X3) terhadap variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y)

### 2.9 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dirumuskan adalah:

- H1: Kompetensi Aparat Desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
- H2: Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
- H3: Pengendalian Internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

### 3.3 Variabel Penelitian

**Tabel 3. Operasional Variabel**

No	Variabel	Indikator	Skala
1	X1: Kompetensi Aparat Desa	Diukur dengan pengetahuan ( <i>knowledge</i> ), keterampilan/keahlian ( <i>skill</i> ), kemampuan ( <i>ability</i> ), keramahan dan kesopanan / sikap ( <i>attitude</i> ) kepada masyarakat (Mada <i>et al.</i> 2017).	Interval
2	X2: Pemanfaatan Teknologi Informasi	Diukur dengan melihat dari penggunaan aplikasi SISKEUDES, dilihat dari kemampuan dalam menginput, memproses, menyimpan dan mengatur data (Luthfiani, 2020)	Interval
3	X3: Pengendalian Intern	Diukur dengan Lingkungan pengendalian, Penilaian risiko, Kegiatan pengendalian, Informasi dan komunikasi, Pemantauan pengendalian intern. (PP No.60 Tahun 2008)	Interval
4	Y: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Diukur menggunakan 5 indikator (Mada <i>et al.</i> 2017) Kejujuran dan keterbukaan informasi., Kepatuhan dalam pembuatan laporan, Kesesuaian dengan prosedur, Kecukupan informasi, Ketepatan dalam penyampaian laporan.	Interva

Sumber: Data diolah Peneliti

### 3.4 Metode Analisis Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan melakukan teknik survei, yaitu dengan memberikan kuesioner yang langsung disebarkan kepada responden di Kecamatan Maro Sebo Ilir Kabupaten Batang Hari. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan dengan analisis regresi berganda yang diformulasikan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_2 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = Akuntabilitas pengelolaan dana desa

$\alpha$  = Konstanta

$\beta_1$ - $\beta_3$  = Koefisien Regresi

### 3. METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1 Jenis dan Sumber Pengumpulan Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif. Penelitian ini dilakukan pada pemerintahan desa di Kabupaten Muaro Jambi. Untuk menguji hipotesis data-data angka diolah dengan metode statistik. Sumber data adalah data primer yang di peroleh dari penyebaran kuesioner.

#### 3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pengelola dana desa pada 7 desa di Kecamatan Maro Sebo Ilir Kabupaten Batang Hari Teknik penentuan sampel nonprobability sampling berupa purposive sampling (Sugiyono, 2019). Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah sekretaris desa, kepala seksi, kepala urusan, ketua BPD, wakil ketua BPD.

X1 = Kompetensi Aparat Desa

X2 = Pemanfaatan Teknologi Informasi

X3 = Pengendalian Intern

$\varepsilon$  = Variabel kesalahan (*error terms*)

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum

Kecamatan Maro Sebo Ilir merupakan salah satu Kecamatan yang terletak di Kabupaten Batang Hari. Kecamatan Maro Sebo Ilir memiliki 7 Desa dan dijadikan sampel dalam penelitian ini. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner yang telah disebarkan kepada responden penelitian, yaitu kepala desa, sekretaris desa, kasi pemerintahan, kasi kesejahteraan

pemuda dan olahraga, kaur umum, kaur keuangan dan bendahara, ketua BPD, sekretaris BPD, anggota BPD, kadus (kepala dusun), dan masyarakat (Ketua RT). 7 desa yang dimaksud adalah Desa Bulian Jaya, Desa

Tidar Kuranji, Desa Kehidupan Baru, Desa Bukit Sari, Desa Karya Mukti, Desa Terusan, dan Desa Danau Embat, peneliti telah menyebarkan sebanyak 98 kuesioner dengan tingkat pengembalian berikut ini:

**Tabel 4. Distribusi Kuesioner**

No	Keterangan	Jumlah Kuesioner	Persentase (%)
1	Kuesioner yang disebar	98	100
2	Kuesioner yang kembali	98	100
3	Kuesioner yang tidak kembali	0	0
4	Kuesioner yang dapat diolah	98	100

Sumber: Data Primer, 2022

## 4.2. Hasil Analisis Data

### 4.2.1. Hasil Uji Validitas

Uji validitas yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pearson correlation dengan bantuan program SPSS 23. Dimana pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai signifikansi yang menghubungkan

skor butir pertanyaan dengan skor total. Pengujian dalam penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi 5% dengan kriteria pengujian jika nilai signifikansi < alpha 0,05 maka butir pernyataan dinyatakan valid, namun jika nilai nilai signifikansi > alpha 0,05 maka butir pernyataan dinyatakan tidak valid (Ghozali, 2016).

**Tabel 5. Hasil Uji Validitas Terhadap Variabel Kompetensi Aparat Desa (X1)**

Variabel	Item	Nilai Signifikansi	Alpha	Keterangan
Kompetensi Aparat Desa	X1	0,000	0,05	Valid
	X2	0,000	0,05	Valid
	X3	0,000	0,05	Valid

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 23 for Windows

Berdasarkan hasil uji validitas pada tabel diatas, setiap item pernyataan variabel kompetensi aparat desa (X1) menghasilkan nilai signifikansi lebih kecil dari

nilai alpha 0,05. Sehingga dalam hal ini menyatakan bahwa instrumen penelitian berjumlah delapan pernyataan dalam penelitian ini dinyatakan valid.

**Tabel Hasil 6. Uji Validitas Terhadap Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2)**

Variabel	Item	Nilai Signifikansi	Alpha	Keterangan
Pamanfaatan Teknologi Informasi	X1	0,000	0,05	Valid
	X2	0,000	0,05	Valid
	X3	0,000	0,05	Valid
	X4	0,000	0,05	Valid

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 23 for Windows

Berdasarkan hasil uji validitas pada tabel diatas, setiap item pernyataan variabel pemanfaatan teknologi informasi (X2) menghasilkan nilai signifikansi lebih

kecil dari nilai alpha 0,05. Sehingga dalam hal ini menyatakan bahwa instrumen penelitian berjumlah empat pernyataan dalam penelitian ini dinyatakan valid.

**Tabel 7. Hasil Uji Validitas Terhadap Variabel Sistem Pengendalian Internal (X3)**

Variabel	Item	Nilai Signifikansi	Alpha	Keterangan
	X1	0,000	0,05	Valid
	X2	0,000	0,05	Valid
	X3	0,000	0,05	Valid

Sistem Pengendalian Internal	X4	0,000	0,05	Valid
	X5	0,000	0,05	Valid
	X6	0,000	0,05	Valid
	X7	0,000	0,05	Valid
	X8	0,000	0,05	Valid
	X9	0,000	0,05	Valid
	X10	0,000	0,05	Valid
	X11	0,000	0,05	Valid

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 23 for Windows

Berdasarkan hasil uji validitas pada tabel diatas, setiap item pernyataan variabel kompetensi sistem pengendalian internal (X3) menghasilkan nilai signifikansi lebih kecil dari nilai alpha 0,05. Sehingga

dalam hal ini menyatakan bahwa instrumen penelitian berjumlah sebelas pernyataan dalam penelitian ini dinyatakan valid.

**Tabel 8. Hasil Uji Validitas Terhadap Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)**

Variabel	Item	Nilai Signifikansi	Alpha	Keterangan
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	X1	0,000	0,05	Valid
	X2	0,000	0,05	Valid
	X3	0,000	0,05	Valid
	X4	0,000	0,05	Valid
	X5	0,000	0,05	Valid
	X6	0,000	0,05	Valid
	X7	0,000	0,05	Valid
	X8	0,000	0,05	Valid
	X9	0,000	0,05	Valid
	X10	0,000	0,05	Valid

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 23 for Windows

Berdasarkan hasil uji validitas pada tabel diatas, setiap item pernyataan variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y) menghasilkan nilai signifikansi lebih kecil dari nilai alpha 0,05. Sehingga dalam hal ini menyatakan bahwa instrumen penelitian berjumlah sepuluh pernyataan dalam penelitian ini dinyatakan valid.

menggunakan teknik pengukuran sekali saja (one shot). Dimana hasil dari pengukuran tersebut nantinya kan dibandingkan dengan pertanyaan lain dengan menggunakan uji statistik Cronbach's Alpha. Suatu variabel dikatakan reliabel jika nilai Cronbach's Alpha ( $\alpha$ ) > 0,70.

4.2.2. Hasil Uji Reliabilitas

Tabel berikut menunjukkan hasil uji reliabilitas terhadap semua item pernyataan untuk setiap variabel dalam penelitian ini:

Ghozali (2016) menyebutkan bahwa pengukuran reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan

**Tabel 9. Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach's Alpha	N of Item
Kompetensi Aparat Desa	0,855	8
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,701	4
Sistem Pengendalian Internal	0,894	11
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	0,923	10

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 23 for Windows

Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada tabel diatas menunjukkan angka Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,70 yaitu untuk variabel kompetensi aparat desa sebesar 0,855, untuk variabel pemanfaatan teknologi informasi sebesar 0,701, untuk variabel sistem pengendalian internal sebesar 0,894, dan untuk variabel akuntabilitas

pengelolaan dana desa sebesar 0,923. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua pernyataan untuk setiap variabel teruji reliabilitasnya sehingga dinilai cukup keandalannya.

4.2.3. Hasil Uji Asumsi Klasik

normalitas pada penelitian ini berdistribusi normal. Berikut tabel hasil uji normalitas:

1) Hasil Uji Normalitas

Pengujian normalitas yang dilakukan dengan menggunakan SPSS 23 diperoleh hasil bahwa uji

**Tabel 10. Hasil Uji Normalitas Kolmogrov-Smirnov Test**

One-Sample Kolmogrov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		98
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	2,38020398
Most Extreme Differences	Absolute	0,087
	Positive	0,087
	Negative	-0,087
Test Statistic		0,087
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,067c

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 23 for Windows

Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan metode Kolmogrov-Smirnov didapatkan hasil signifikansi dari uji normalitas sebesar 0,067 yang menunjukkan hasil ini lebih besar dari taraf signifikansi 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data yang di ambil berdistribusi normal.

2) Hasil Uji Multikolinearitas

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dengan menggunakan SPSS 23 maka didapatkan hasil uji multikolienaritas sebagai berikut:

**Tabel 11. Hasil Uji Multikolinearitas**

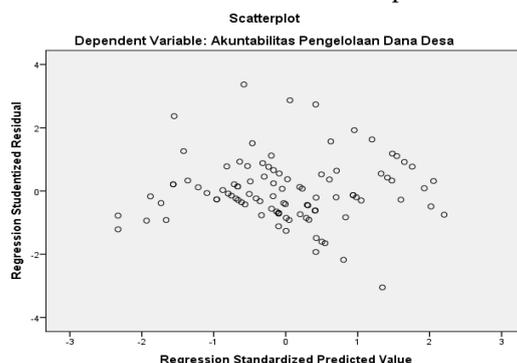
Coefficients <sup>a</sup>			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Kompetensi Aparat Desa	0,617	1,621
	Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,555	1,801
	Sistem Pengendalian Internal	0,407	2,455

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 23 for Windows

Tabel hasil pengujian uji multikoleniaritas menunjukkan bahwa nilai Tolerance setiap variabel lebih besar dari 0,01 dan nilai VIF kompetensi aparat desa sebesar 1,621 nilai VIF pemanfaatan teknologi informasi sebesar 1,801, nilai VIF sistem pengendalian internal sebesar 2,455 kurang dari 10, maka dapat dinyatakan bahwa antar variabel bebas tidak terjadi multikolinearitas.

3) Hasil Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah suatu model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu kepengamatan yang lain (Ghozali, 2016). Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan uji SPSS 23 dengan metode uji grafik scatterplot maka didapatkan hasil sebagai berikut



Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 23 for Windows

**Gambar 2. Hasil Uji Heterokedastisitas dengan Uji Grafik Scatterplot**

Grafik scatterplot diatas menunjukkan bahwa titik-titik data menyebar di atas dan dibawah atau disekitar angka 0, titik-titik tidak hanya mengumpul di satu titik dan penyebaran titik-titik

tidak berpola. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heterokedastisitas dalam model regresi ini.

4) Hasil Uji Autokorelasi

**Tabel 12. Hasil Uji Autokorelasi**

	Unstandardized Residual
Test Valuea	-0,33076
Cases < Test Value	49
Cases >= Test Value	49
Total Cases	98
Number of Runs	42
Z	-1,625
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,104

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 23 for Windows

Tabel uji autokorelasi diatas menunjukkan bahwa nilai signifikan 0,104 lebih besar dari 0,05. Maka

dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah atau gejala autokorelasi pada penelitian ini.

**4.3. Pengujian Hipotesis**

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda adalah sebagai berikut:

**Tabel 13. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda**

Model		Unstandarized Coefficients		Standarized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-2,490	2,802		-0,889	0,376
	Kompetensi Aparat Desa	0,272	0,114	0,177	2,386	0,019
	Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,158	0,181	0,068	0,872	0,386
	Sistem Pengendalian Internal	0,510	0,098	0,477	5,224	0,000

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 23 for Windows

Tabel di atas menunjukkan bahwa model persamaan regresi linear berganda adalah:

$$Y = -2,490 + 0,272X_1 + 0,158X_2 + 0,510X_3 + \varepsilon$$

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

**Tabel Hasil 14. Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Model summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,829a	0,687	0,670	2,444

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 23 for Windows

Hasil perhitungan koefisien determinasi diperoleh nilai sebesar 0,670 artinya 67% dari variabel kompetensi aparat desa, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Hasil penelitian terhadap hipotesis penelitian yang dikembangkan, secara ringkas disajikan pada tabel dibawah ini:

**Tabel 15. Hasil Pengujian Hipotesis**

Hipotesis	Pernyataan	Hasil
H1	Kompetensi aparat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa	Hipotesis diterima

H2	Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa	Hipotesis ditolak
H3	Sistempengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa	Hipotesis diterima

Sumber: Data Diolah

### 4.3 Pembahasan

#### 4.3.1 Pengaruh Kompetensi Aparat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa variabel kompetensi aparat desa didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,019 lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, hipotesis pertama diterima yang berarti bahwa kompetensi aparat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori agensi (Agency Theory) yang menjelaskan tentang adanya perbedaan kepentingan antara principal dan agen. Hal tersebut dapat diminimalisir dengan cara meningkatkan kompetensi aparat desa terkait dengan pengelolaan dana desa. kompetensi yang baik dari aparat desa dapat meningkatkan akuntabilitas yang dapat membantu prinsipal dalam menerapkan mekanisme kontrolnya. Pemahaman aparat desa terkait dengan tata cara dalam pertanggungjawaban dan pengalokasian dana desa mencerminkan kompetensi yang dimiliki setiap individu dalam organisasi pemerintahan desa.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mada, dkk (2017), Aziiz dan Prastiti (2019), Gayatri dan Komang (2019) dan Aprilya dan Fitriya (2020) yang menunjukkan bahwa kompetensi aparat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Artinya semakin kompeten aparat desa dalam pengelolaan dana desa maka akan semakin akuntabel dalam pengelolaan dana desa. Hal ini tentunya didukung oleh latar belakang pendidikan yang memadai, seringkali aparat desa mengikuti pelatihan dan pendidikan terkait desa dan mempunyai keterampilan dalam bidang keuangan. Penelitian ini semakin memperkuat hasil penelitian sebelumnya terkait kompetensi aparat desa berpengaruh pada akuntabilitas pengelolaan dana desa.

#### 4.3.2 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hasil penelitian ini menunjukkan hasil bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi didapatkan nilai signifikansi 0,386 lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, hipotesis ketiga ditolak. Artinya pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sehingga hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori agensi dimana prinsipal menuntut agen untuk dapat memanfaatkan teknologi informasi agar mendapatkan kualitas laporan keuangan desa yang lebih baik. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aziiz dan Prastiti (2019) yang menyatakan bahwa pemanfaatan

teknologi informasi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa, yang didukung dengan teori agensi dimana sebagai agen pemerintah desa harus dapat menyediakan dan memanfaatkan teknologi informasi yang efektif dan efisien agar mendapatkan kualitas laporan keuangan desa yang lebih baik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Karyadi (2019) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa, hal ini masih menunjukkan kurangnya kesadaran bagi pemerintah dan staf desa akan pentingnya teknologi untuk mendapatkan informasi secara cepat dan tanggap, kemajuan teknologi masih belum bisa dimanfaatkan dengan baik. Hal ini berarti bahwa keberadaan komputer dan ada tidaknya jaringan internet yang memadai tidak akan mempengaruhi aparat desa dalam melaksanakan tugasnya untuk mengelola dana desa. Dengan demikian, akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Kecamatan Maro Sebo Ilir tidak sepenuhnya didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi.

#### 4.3.3 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan didapatnya nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, hipotesis keempat diterima yang artinya bahwa variabel sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dalam teori agensi prinsipal menuntut agen untuk dapat membuat pengendalian internal yang efektif dan efisien agar mendapatkan kualitas laporan keuangan desa yang terhindar dari segala bentuk kecurangan. Sistem pengendalian internal berpengaruh dalam terciptanya akuntabilitas pengelolaan dana desa yang baik, dengan adanya sistem pengendalian internal maka akan terciptanya pengawasan dari pemerintah dalam setiap kegiatan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah desa dan dapat meminimalisir adanya tindak kecurangan dan penyelewengan dalam pengelolaan keuangannya. Penelitian yang dilakukan oleh Karyadi (2019) menegaskan bahwa tingkat pengendalian internal Kepala Desa dan BPD yang tinggi akan mengurangi terjadinya fraud (penggelapan) dan penerapan kode etik secara tertulis di instansi pemerintahan yang paling bawah yakni Pemerintah Desa akan mendorong moral kerja yang tinggi dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pemerintah desa kepada masyarakat dan pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Aziiz dan Prastiti (2019) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal merupakan faktor penting dalam memberikan pengawasan dan pengendalian agar dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi sehingga dapat mendorong pemerintah desa dalam melaksanakan seluruh kegiatan dan pelaporan keuangan secara lebih terarah.

## 5. SIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Simpulan

Penelitian ini menganalisis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian ini dilakukan di desa yang berada pada Kecamatan Maro Sebo Ilir Kabupaten Batang Hari, dengan responden perangkat desa, perangkat BPD dan masyarakat. Dalam pengambilan sampelnya digunakan metode Purposive Sampling. Pengujian yang telah dilakukan mendapatkan hasil yang dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kompetensi aparat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Maro Sebo Ilir adalah diterima.
2. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas di Kecamatan Maro Sebo Ilir adalah diterima.
3. Pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Maro Sebo Ilir

### 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan yang telah peneliti uraikan, maka beberapa saran yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi pihak perangkat desa, BPD, dan masyarakat penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan dalam meningkatkan kompetensi aparat desa, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal dalam rangka menunjang kelancaran tugas yang diberikan agar terciptanya akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan saat melakukan penyebaran kuesioner sebaiknya peneliti memperhatikan waktu penyebaran kuesioner, memilih dan memastikan waktu dimana responden memiliki waktu untuk dapat ditemui.

## DAFTAR REFERENSI

A, A., J, E., & S, B. (2016). *Audit dan Pelayanan Verifikasi*. Erlangga.

Adi, K., Saputra, K., Eka, P., Marvilianti, D., Larasdiputra, G. D., Manurung, D. T. H., & Amani,

T. (2020). Preventing Fraudulent Use of Funds Management Operational Support Education. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(06), 12180–12186.

- Anthony, N, R., & Vijay, G. (2012). *Sistem Pengendalian Manajemen*. Salemba Empat.
- Aprilya, Kartika Restu dan Fitria Asri. (2020). Pengaruh Kompetensi, Komitmen Organisasi, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. E-ISSN: 2460-0585.
- Ardianti, P. A. R., & Suartana, I. W. (2020). *Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Impementasi Sistem Keuangan Desa dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. 1041–1054.
- Aulia, P. (2018). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelolaan Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten 50 Kota. *Jurnal Online Mahasiswa Feb*, 1(1), 1–15.
- Aziiz, Muhammad Nur dan Sawitri Dwi Prastiti. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Aktual*. Vol.6 No.2. Hal. 280-344. E-ISSN: 25801015 p-ISSN: 20879695.
- Bawono, I. R., Kinasih, A. D. M., & Rahayu, A. K. (2020). Factors Affecting Accountability of Village Fund Management through Implementation of the Village Financial System (SISKEUDES). *Journal of Accounting and Investment*, 21(3). <https://doi.org/10.18196/jai.2103160>
- Dewi, N. K. A. J. P., & Gayatri. (2016). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 26.2, 1–23. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v26.i02.p16>
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2017). *Buku Pintar Dana Desa*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Enggar, P. W., Wijayanti, A., & Suhendro. (2020). Pengaruh Kompetepensi aparatatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Indonesia Accounting Journal*, 2(2), 87–91.
- Fathurrahman, A., Suprihati, S., & Samanto, H. (2022). The Influence Of The Quality Of Human Resources, Community Participation, And Utilization Of Information Technology On Village Fund Management Accountabilityin Klaten Regency. *International Journal of Economics*,

- Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 6(3), 1803-1811.
- Fitrawati, Abdul, K., & Iqbal, A. M. (2017). Effect of Clarity of Budget Targets and Internal Control Systems on the Accountability of the Performance of Government Agencies (Survey on the Regional Work Unit (SKPD) of Paringi Mountong Regency. *E Journalist Catalog*, 5 No.12(ISSN: 2302-2019).
- Gayatri, dan Komang A.J.P.D. (2019). Faktor-Faktor yang Berpengaruh Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *E- Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol. 26. ISSN: 2302-8556.
- Guerin, B., McCrae, J., & Shephard, M. (2018). *Accountability in modern government: What are the issues?* 1–56.
- Heriningsih, S., Fitriyani, L. Y., & Sudaryati, D. (2020). Determinants Of Tax Compliance Behaviour (Empirical Studies In Bantul Regency). *Internasional Journal of Economics, Business and Management Research*, 4(07), 1–14.
- Jefri, R. (2018). Teori stewardship dan good governance. *Jurnal Riset Edisi XXVI*, 4(3), 14–28.
- Juardi, M. S. S., Muchlis, M., & Amalia Putri, R. (2018). Evaluasi Penggunaan Aplikasi Siskeudes dalam Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, IV(1), 84–107.
- Handayani, D., Afiah, N. N., & Yudianto, I. (2020). The influence of internal control system, information technology utilization, and organizational commitment on government accountability performance. *Journal of Accounting Auditing and Business-Vol*, 3(2)
- Hendaris, B., & Romli, R. (2021). Effect of village apparatus performance, internal control, information technology utilization on village fund accountability and implications on quality village financial report. *Dinasti International Journal of Management Science*, 2(4), 569-580.
- Karyadi, Muh. (2019). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa (Studi di Kecamatan Aikmel dan Kecamatan Lenek Tahun 2018). *Jurnal Ilmiah Rinjani Universitas Gunung Rinjani*. Vol. 7 No. 2.
- Kessy, A. . (2020). The Demand and Suplly Sides of Accountability in Local Government Authorities in Tanzania. *Public Integrity*, 22 (6), 606–625. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/10999922.2020.1739361>
- Kituyi, O., & Moi, E. (2021). Determinants Of Public Participation In Budget Making Process In Devolved Governments In Kenya: A Case Of Trans Nzoia County. *Journal of International Business, Innovation and Strategic Management*, 5(1), 1–23.
- Kuma, F. K., & Effandi Yosuff, M. (2020). The dynamics of Pecking Order and Agency theories on crowdfunding concept as alternate finance for start-up businesses. *International Journal of Technology and Management Research*, 5(1), 1–13. <https://doi.org/10.47127/ijtmr.v5i1.82>
- Luthfiani, B. M., Asmony, T., & Herwanti, R. T. (2020). Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Lombok Tengah. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(7), 1886. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i07.p20>
- Mada, S., Kalangi, L., & Gamaliel, H. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8(2), 106–115. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.17199>
- Maha Putra, D., & Sulistyowati, W. A. (2021). Measuring Impact of the Accrual Accounting Implementation on Fiscal Transparency Quality: A Mix Method Study in Indonesia. *Journal of Accounting and Investment*, 22(3), 460–481. <https://doi.org/10.18196/jai.v22i3.11441>
- Mardiasmo. (2013). Reformasi Pengelolaan Keuangan publik Menuju Akuntabilitas Publik. *Makalah Yang Disampaikan Dalam Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISES)*, No 12. Hal 248-265.
- Martini, R., Resy Agustin, & Kartika Rachma Sari. (2020). Accrual Discretion Policy on the Excess/Less Budget Financing at the Provincial Level. *TEST Engineering & Management*, 82(9925), 9925–9935.
- Masruhin, A., & Kaukab, M. E. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Partisipasi Masyarakat, Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Perangkat Desa Di Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo). *Journal of Economic, Business and Engineering*, 1(1), 118–130.
- Safelia, N., Brilliant, A. B., Yetti, S., & Olimsar, F. (2022). Investigating Apparatus Competence and Organizational Commitment for the Village Financial System. *International Journal of Finance & Banking Studies (2147-4486)*, 11(4), 37-46
- Nintyari, L. R., Kurniawan, P. S., & Atmaja, T. A. (2019). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sosialisasi, Serta Manajemen Kontrol Terhadap Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) (Studi Empiris Pada Desa-Desa Penerima Dana Desa Di Kabupaten Tabanan). *JIMAT (Jurnal Ilmiah*

- Mahasiswa Akuntansi*, 10(2), 147–157.
- Permendagri No 20 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. (2018).
- Purnamawati, I. G. ., & Adriyani, N. K. K. . (2019). Peran Komitmen, Kompetensi dan Spiritualitas dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10 (2), 227–240. <https://doi.org/10.18202/jamal.2019.08.10013>
- Rosyidi, M. (2018). Pengaruh Transparansi, Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *JOM FEB Riau University, Pekanbaru, Indonesia*, 1(1), 1–14.
- Samaratunge, R., Alam, Q., & Teicher, J. (2008). Public Sector Reforms and Accountability: The Case of south and Southeast Asia. *Public Management Review*, 10 (1), 101–126. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/14719030701763237>
- Saragih, & Radesman. (n.d.). *Pengelolaan Dana Desa di Muaro Jambi Banyak Menyimpang*. <https://www.beritasatu.com/nasional/563153/pengelolaan-dana-desa-di-muarojambi-banyak-menyimpang> (diakses 27 Februari 2023)
- Sari, K. D. C., & Aji, A. B. (2020). Analysis Competence of Village Officials on the Performance of Village Fund Management in Banyumas Regency. *International Journal of Economics, Business ...*, 2020(4), 1215–1224.
- Savitri, E., Andreas, A., Diyanto, V., & Gumanti, T. A. (2020). The Effect of Leadership, Internal Control System, and Organizational Commitment on Accountability of Village Financial Management. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 18(3), 522–532. <https://doi.org/10.21776/ub.jam.2020.018.03.12>
- Schillemans, T., & Bjurstrøm, K. H. (2020). Trust and verification: balancing agency and stewardship theory in the governance of agencies. *International Public Management Journal*, 23(5), 650–676. <https://doi.org/10.1080/10967494.2018.1553807>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Sutopo (Ed.); Kedua). ALFABETA.
- Sulina, G.A.T, Wahyuni, M. ., & P.S Kurniawan. (2017). Peranan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Terhadap Kinerja Pemerintah Desa Kaba-Kaba, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. *E-Journal Universitas Pendidikan Ganesha. Jurnal Akuntansi.*, 8 (1), 1–12.
- Sulindawati, & Erni, N. L. G. (2018). Analisis Usability untuk Mengukur Efektivitas Implementasi Sistem Keuangan Dana Desa. *Seminar Nasional Riset Inovatif ISBN*.
- Taufik, O., & Ikram, S. (2022). Factors Affecting Village Financial Management Accountability. *Journal of Accounting Auditing and Business*, 5(2), 29-42
- Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa*. (2014).
- Wibowo. (2019). *Manajemen Kinerja* (Edisi Keempat). Rajawali Pres
- Widiawati, D., Yuliani, N. L., & Purwantini, A. H. (2022). Analysis of Determinants on Village Fund Management Accountability. *Urecol Journal. Part B: Economics and Business*, 2(1), 9-19
- Zulkifli, Sulaiman, Wahyudi, R., & Martini, R. (2020). Peran Kompetensi, Komitmen dan Partisipasi Masyarakat Bagi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *ISAS Publishing*, 6(2), 106–113.